

**PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DALAM
DEMOKRASI KOMUNITARIAN**

(Studi Kasus Di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

Tumiang Farantika
19520181

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

**PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DALAM
DEMOKRASI KOMUNITARIAN**
(Studi Kasus Di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

Tumiang Farantika
19520181

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2023


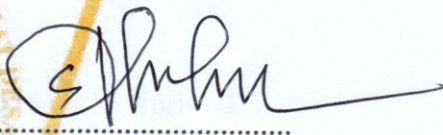
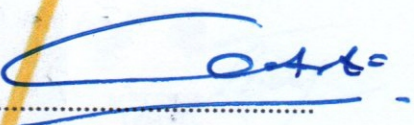


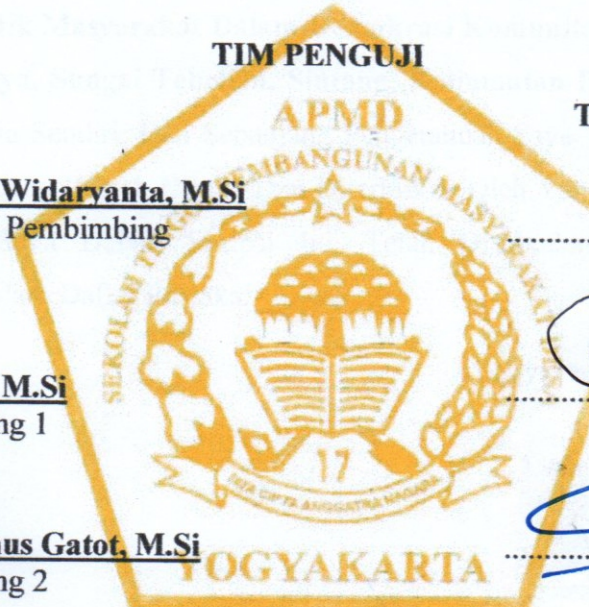
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:



Hari : Senin
Tanggal : 05 Juni 2023
Waktu : 12.00 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
2. <u>Dr. Supardal, M.Si</u> Penguji Samping 1	
3. <u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Penguji Samping 2	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa


HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tumiang Farantika

NIM : 19520181

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul **“Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Demokrasi Komunitarian (Studi Kasus di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat)”** Adalah Betul-Betul Karya Saya Sendiri, Dan Sepanjang Pengetahuan Saya Tidak Terdapat Karya Atau Pendapat Yang Pernah Ditulis Dan Diterbitkan Oleh Yang Lain. Hal-Hal Yang Bukan Karya Saya Dalam Skripsi Ini, Telah Disebutkan Dalam Teks Dan Dicantumkan Dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 16 April 2023

Ya, ataan


Tumiang Farantika

NIM: 19520181

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Demokrasi Komunitarian (Studi Kasus di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat)”**

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Dr. Supardal selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Drs. R.Yulianus Gatot, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
7. Seluruh keluarga besar civitas akademik STPMD ‘APMD’ Yogyakarta.
8. Kepala Desa beserta jajaran, serta masyarakat Desa Baya Mulya yang telah memberi kemudahan bagi sayag dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan skripsi saya.

9. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 16 April 2023

Penulis

Tumiang Farantika

NIM: 19520181

MOTTO

Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Kesabaran,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan

(Tumiang Farantika)

Lebih Baik Tahu Sedikit Banyak Hal, Daripada Tahu Banyak Tapi Hanya Satu Hal

(Mikhael Zanuardi)

Hidup Ini Keras Kawan, Tak Kerja Tak Makan

(Tumiang Farantika)

Pendidikan Adalah Senjata Paling Mematikan Di Dunia Karena Dengan
Pendidikan, Anda Dapat Mengubah Dunia

(Nelson Mandela)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Kepada orang tua saya yang saya cintai dan saya banggai Ayah Jaedi Ibu Marta, dan Fitriani yang telah memberi dukungan serta doa selama proses saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, mencari ilmu dan pengalaman dalam menggapai cita – cita
3. Untuk pasukan kontrakan SEMADAK yang selalu memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi.
4. Untuk teman-teman seperjuangan saya (Galuh, Yoggi, Yuda, Aprian, Okky, Shella)
5. Untuk Buk De & Pak De kantin yang selalu baik hati dan ramah ketika jajan dikantin.
6. Untuk teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Literatur Review.....	5
G. Kerangka Konseptual	12
1. Demokrasi Komunitarian	12
2. Partisipasi Masyarakat.....	14
3. Governance	16
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data.....	24
BAB II PROFIL DESA BAYA MULYA.....	26
A. Sejarah Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat.....	26

B. Gambaran Wilayah Desa Baya Mulya	27
C. Potensi Sumber Daya Alam	29
D. Potensi Sumber Daya Manusia	31
E. Pemerintahan Desa.....	34
F. Visi dan Misi Arah Pembangunan Desa.....	37
BAB III RUANG LINGKUP PARTISIPASI MASYARAKAT DESA.....	40
A. Representasi Masyarakat.....	40
B. Partisipasi Masyarakat Desa Baya Mulya.....	43
C. Praktek Demokrasi Desa Baya Mulya.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian.....	22
Tabel 1. 2 Teknik Pengumpulan Data	23
Tabel 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Desa Baya Mulya 2019 – 2021	31
Tabel 2. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Baya Mulya.....	32
Tabel 2. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja Desa Baya Mulya.....	32
Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baya Mulya	33
Tabel 2. 5 Daftar Nama Kepala Desa Baya Mulya	34
Tabel 2. 6 Daftar Nama Sekretaris Desa Baya Mulya.....	34
Tabel 2. 7 LKD Baya Mulya	36
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Transportasi	37
Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 SOTK Pemerintah Desa Baya Mulya	35
Gambar 3. 1 Kelembagaan Desa Baya Mulya.....	41
Gambar 3. 2 Daftar Masalah dan Potensi Desa Baya Mulya	44
Gambar 3. 3 Berita Acara Musdes dan Lampiran Kepdes Pembentukan TIM Penyusun RPMDesa Baya Mulya Tahun 2021-2027	47
Gambar 3. 4 Berita Acara Musrenbangdes RPJMDes 2021-2027	48
Gambar 3. 5 Berita Acara Pengkajian Keadaan Desa Tingkat Dusun	49
Gambar 3. 6 Dokumentasi Musyawarah	50

INTISARI

Skripsi ini membahas penguatan partisipasi politik masyarakat desa dalam mewujudkan demokrasi komunitarian di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat. Fakta yang terjadi di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang menunjukkan partisipasi politik masyarakat yang rendah. Dalam proses perencanaan pembangunan yang terjadi masyarakat desa tidak diikutsertakan. Alhasil, dampak dari perencanaan pembangunan hanya berfokus pada kebutuhan yang hanya menasar individu maupun keluarga. Perencanaan tidak memiliki dampak positif bagi hajat hidup orang banyak. Ditelaah dengan berbagai faktor interaksi yang terbangun antara pemerintah dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga hal untuk mengumpulkan data. Yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ada 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa Baya Mulya, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model Miles dan Huberman. Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yakni Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Partipasi politik masyarakat desa Baya Mulya dalam pengambilan keputusan masih dalam tahap terlibat aktif mengusulkan aspirasinya. Partisipasi masyarakat desa Baya Mulya dalam pelaksanaan pembangunan hanya sebatas menghibahkan tanah untuk desa yang diharapkan untuk diolah dan kembali kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat desa Baya Mulya dalam pemantauan dan evaluasi sangatlah kritis dan kecewa terhadap apa yang dilakukan pemerintah desa atas tanah yang dihibahkan untuk desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dinilai belum ada, karena memang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Baya Mulya dianggap belum ada. Praktek demokrasi desa yang terjadi adalah formalistik, yang hanya sebagai prosedural belaka.

Kata kunci: Partisipasi, Demokrasi Komunitarian, Governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penguatan partisipasi politik masyarakat desa dalam mewujudkan demokrasi komunitarian di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat. Didasarkan dari refleksi bahwa: *Pertama*, esensi dari demokrasi desa adalah sebuah nilai yang berangkat dari praktek musyawarah atau yang disebut dengan nama lain pada desa-desa di Indonesia. *Kedua*, praktek demokrasi yang terjadi di ranah desa adalah praktek elektoralisme yang berdampak pada jalannya pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap empat kewenangan yang dimiliki desa.

Studi tentang penguatan partisipasi politik masyarakat desa yang berkembang melalui praktik-praktik deliberatif penting dilakukan. Oleh karena, esensi dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk warga. Output atau ‘untuk warga’ tergantung dari bagaimana pengelolaan yang terjadi pada input yakni ‘dari rakyat’. Partisipasi politik berada pada ‘oleh rakyat’ untuk menjembatani antara kedaulatan dan manfaat. Sehingga, demokrasi yang terjadi bukan sebagai hingar-bingar belaka. Secara sederhana, partisipasi ini berkaitan dengan aspirasi (*voice*), kesempatan (akses), dan pengawasan (kontrol).

Fakta yang terjadi di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang menunjukkan partisipasi politik masyarakat yang rendah. Dalam proses perencanaan

pembangunan yang terjadi masyarakat desa tidak diikutsertakan. Alhasil, dampak dari perencanaan pembangunan hanya berfokus pada kebutuhan yang hanya menyangkut individu maupun keluarga. Perencanaan tidak memiliki dampak positif bagi hajat hidup orang banyak. Ditelaah dengan berbagai faktor interaksi yang terbangun antara pemerintah dengan masyarakat.

Musyawarah desa adalah sebuah proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Musyawarah desa atau pada penelitian ini diartikan sebagai musyawarah mufakat mengandung prinsip diskursus, kesetaraan, dan keadilan. Sementara, partisipasi adalah bagian dari demokrasi deliberatif agar tidak terjadi pembusukan demokrasi. Adapun makna yang terkandung dalam musyawarah mufakat sebagai wadah kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong secara terbuka untuk saling bertukar informasi dan saling membentengi dan melindungi desa.

Partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah di desa Baya Mulya, masyarakat tidak banyak dilibatkan. Proses perencanaan pembangunan yang terjadi hanya menyangkut pada individu dan bahkan hanya lingkup keluarga orang yang memiliki kuasa. Padahal, esensi dari musyawarah mufakat di desa adalah menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Jadi, musyawarah desa dilakukan hanyalah sebatas formalitas atau dapat dikatakan semacam sosialisasi pembangunan. Aspirasi (*voice*) dari masyarakat tidak pernah terwujud dalam proses perencanaan pembangunan.

Representasi yang berkaitan dengan akses dalam pelaksanaan di desa Baya Mulya juga tidak merata. Keterwakilan pemuda yang minim, kelompok perempuan yang minim, dan beberapa elemen kelompok yang ada di desa Baya Mulya tidak

mendapat akses dalam wadah yang bernama musyawarah desa. Padahal, salah satu nilai yang terkandung dalam musyawarah merupakan persetujuan dan berbagai pendapat masyarakat yang terhimpun sangat bermanfaat sebagai modal awal musyawarah desa. Musyawarah hanya diisi para kepala dusun dan keluarga kepala maupun perangkat desa.

Kapasitas penyelenggaraan musyawarah desa hanyalah menjadi dominasi aktor berpengaruh yang memiliki kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa. Sehingga, kontrol masyarakat menjadi lemah. Apalagi, fakta historis desa Baya Mulya yang merupakan sebuah desa hasil pemekaran. Kesiapan dalam pelaksanaan musyawarah menjadi sangsi dan kurang mengetahui tujuan hadirnya musyawarah desa. Kesiapan dari pemerintah desa adalah sebuah kegagalan dalam cara membangun desa. Perangkat desa yang duduk menjalankan roda pemerintahan pun diambil hanya dari sanak sodara para perangkat tersendiri.

Kualitas demokrasi yang seharusnya menciptakan organisasi lokal atau yang disebut tercipta elemen-elemen warga atas prakarsanya sendiri, kemudian musyawarah desa menjadi arena partisipasi dan representasi menjadi buruk. Kualitas demokrasi yang terjadi hanyalah demokrasi ilusi atau hingar bingar saja. Sejatinya masyarakat lokal yang berbasis kolektivisme, memiliki kebaikan bersama, berwadah musyawarah desa, modelnya adalah demokrasi deliberatif (permusyawaratan).

Dari beberapa fakta diatas, studi tentang demokrasi desa menjadi penting untuk dilihat. Karena, fakta menunjukan bahwa aspirasi (*voice*) dari masyarakat desa

tidak pernah dilibatkan. Masyarakat desa tidak mengerti dan hanya menerima ada hasil dari perencanaan. Akses yang dibuka bukanlah akses publik supaya masyarakat dapat terlibat. Namun, lebih banyak didominasi oleh kepala dusun dan keluarga dari kepala maupun perangkat desa. Dari situ diperoleh kontrol yang lemah oleh masyarakat terhadap pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan diatas, maka pertanyaan kajian ini adalah “Bagaimana Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Perlu Diwujudkan Dalam Demokrasi Desa ?”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal yakni: *pertama*, representasi dan partisipasi masyarakat desa; *kedua*, praktek demokrasi desa. Keduanya ini berada di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan partisipasi politik masyarakat desa yang terjadi di desa Baya Mulya.

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan partisipasi politik masyarakat desa Baya Mulya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain untuk mengembangkan konsep-konsep tentang partisipasi dan demokrasi desa yang belum dikaji.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat dalam penguatan partisipasi politik masyarakat desa.

F. Literatur Review

Berbicara tentang partisipasi tidak terlepas dari subjek partisipasi yang kemudian melahirkan bentuk partisipasi. Berbeda subjek tentunya akan berbeda pula bentuk partisipasinya. Sutoro Eko dalam bukunya yang berjudul 'Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan' membagi partisipasi menjadi tiga hal yang dilihat dari subjek. Yakni, partisipasi rakyat, masyarakat, dan warga. Dari segi bentuk dikenal partisipasi sosial dan partisipasi politik. Dalam partisipasi sosial, hampir setiap orang terlibat seperti dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kampung, atau penggalangan dana amal solidaritas untuk korban bencana (Eko, 2013).

Partisipasi rakyat, masyarakat, dan warga dalam ranah politik menampilkan bentuk yang beragam. Partisipasi rakyat terjadi pada saat

pergantian pemimpin atau proses elektoral. Partisipasi masyarakat terjadi antara lain dalam proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Di lain sisi, musrenbang adalah ruang yang disediakan untuk masyarakat oleh pemerintah dan sebagai ruang korporatis untuk melokalisir partisipasi hanya dalam bentuk mengusulkan kebutuhan bersama. Partisipasi warga merupakan artikulasi *voice*, akses, dan kontrol atas *interves* dan *rights* warga terhadap negara baik secara individual maupun melalui organisasi warga (Eko, 2013).

Terkadang, segala hal bentuk partisipasi terutama yang ada di desa digeneralisir menjadi satu bentuk tunggal partisipasi masyarakat desa. Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat terjadi dalam beberapa bentuk lagi. Misalnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Safrilul Ulum dan Dewi Amanatun Suryani tentang 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong' yang dimuat dalam JMKP: Jurnal Management dan Kebijakan Publik, volume 3, nomor 1, bulan maret, tahun 2021. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat guna memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah berdasarkan rencana awal yang disusun dan disepakati bersama dalam wujud program (Ulum & Dewi, 2021).

Masih dalam penelitian Ulum dan Dewi, partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua, yakni partisipasi nyata dan abstrak. Bentuk nyata adalah masyarakat bergotong royong, menjadi pemandu wisata, menyediakan kuliner, hingga melalui uang yang bersumber pada iuran maupun menyediakan alat tenun. Sedangkan

bentuk abstraknya adalah gagasan atau ide yang diambil dari perwakilan masyarakat yang mengikuti arus dari hasil musyawarah. Adapun bentuk lain, seperti halnya penelitian Sadam, Maemunah, dan Mariki Dala tentang ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubadha Sebagai Desa Wisata’ yang dimuat dalam jurnal Seminar Nasional Paedagoria, volume 1, september 2021.

Penelitian tersebut berfokus pada partisipasi masyarakat desa adat Tutubadha, Nagakeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak beda dengan Ulum dan Dewi, melihat partisipasi dalam bentuk nyata dan abstrak. Namun, bahasa Sadam dan kawan-kawan digunakan adalah tenaga dan pikiran. Dalam hal ini, partisipasi diletakan sebagai aksi pembangunan pariwisata desa. Peranan dari masyarakat desa menjadi modal penting untuk mewujudkan sebuah desa wisata. Adapun hasil penelitian ini adalah sumbangan tenaga dan pikiran yang masih kurang, namun dalam hal sumbangan harta benda cukup baik.

Masih banyak lagi partisipasi masyarakat yang dipahami atau diletakan dalam bentuk-bentuk serupa. Penelitian yang dilakukan Susi Febriani berjudul ‘Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata Blue Lagon Dalem Widodomartani Ngemplak Sleman’ dimuat dalam Journal Student Uny.ac.id. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan populasi 130 kepala rumah tangga di dusun Dalem. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik probability random sampling. Hasil penelitian ini terdapat banyak faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan yang mempengaruhi tingkat

partisipasi dalam kegiatan pariwisata di Blue Lagon masuk dalam kategori sedang.

Pemahaman lain dari bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dalam penelitian Iradhad, Marino, dan Hadi berjudul ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019’ dimuat dalam SAWALA jurnal administrasi negara, volume 10, nomor 1, juni 2022. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa APBDes yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan APBDes Desa Pait sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran (Idat dkk, 2022).

Partisipasi masyarakat yang memang lebih ditekankan seperti penelitian diatas tentunya melibatkan apa yang disebut dengan unsur masyarakat atau sebuah perwakilan-perwakilan masyarakat. Seperti dalam penelitian Rafi’atul Hadiwijaya, Indra Muda, dan Beby Mastitho Batubara yang berjudul ‘Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa’ dimuat dalam Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, volume 3, nomor 2, tahun 2021. Penelitian ini meletakkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa yakni sebagai keterlibatan aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan di desa.

Penelitian Rafi'atul dkk meletakkan masyarakat dalam berbagai kelompok, yakni perwakilan kelompok, lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, dan unsur lain. Beberapa tokoh ini diundang terus selama proses musrenbang desa. Selain partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadiran, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam bentuk memberikan usulan program karena sasaran musrenbang desa yang sebenarnya adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat (Muda, I., & Batubara, 2021).

Seperti halnya dalam penelitian Darin, Usman Moonti, dan Sri Indriyani yang berjudul 'Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa' dimuat dalam Jurnal Oikos-Nomos Kajian Ekonomi dan Bisnis, volume 15, nomor 1, Juni 2022 mengafirmasi pendapat partisipasi masyarakat yakni bentuknya dalam musrenbang. Penelitian ini mendukung penelitian sebelum-sebelumnya yang cantumkan diatas. Representasi masyarakat dilihat dalam bentuk keterwakilan yang datang pada musrenbang desa. Karena forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga publik (Darin, Moonti, & Dai, 2022).

Forum seperti halnya musrenbang ataupun bentuk lain yang pada hakekatnya adalah musyawarah sejatinya adalah forum demokrasi desa. Budi Hardiman dalam salah satu bukunya yang diberi judul 'Demokrasi Deliberatif;

Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas’ memberikan gambaran mengenai makna demokrasi deliberatif dan sebuah legitimasi. Dijelaskan olehnya, bahwasanya istilah ‘deliberasi’ yang dalam bahasa Latin *‘deliberatio’*, kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *‘deliberation’*, memiliki arti ‘konsultasi’, ‘menimbang nimbang’, atau lebih akrab dikenal sebagai ‘musyawarah’. Dalam hal ini, ditempatkan sebagai urusan publik atau kebersamaan secara politis.

Terkadang, demokrasi desa dipahami dalam kerangka elektoralisme di desa. Banyak sekali penelitian yang melihat demokrasi di desa adalah sebuah proses elektoral. Demokrasi di desa adalah sebuah upaya mewujudkan pemerintahan desa yang modern. Ini juga sebagai bentuk lanjut dari sebuah partisipasi masyarakat. Penelitian Yudi Rusfiana tentang ‘Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021’ dimuat dalam *SAGACIOUS JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, Volume 9, Nomor 1, tahun 2022 merupakan salah satu contohnya.

Ekspektasi atas sehatnya pemilihan Kepala Desa sebagai wahana demokratisasi sangat besar disampaing di beberapa daerah sudah dilaksanakan sejak lama (Rusfiana, 2022). Padahal, demokrasi di desa adalah budaya musyawarah. Budaya politik masyarakat desa yang mengutamakan musyawarah dan gotong royong digantikan dengan budaya pemilihan langsung (Renaldi et al., 2021). Selain itu, meskipun dalam konteks pergantian

kepemimpinan, tetaplah ada sebuah musyawarah terlebih dahulu. Seperti halnya pada persyaratan tertentu atau pemilihan kepala desa yang diketahui pemenangnya sebelumnya karena putusan musyawarah.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Alaydrus, dkk tentang Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Timbau Kabupaten Kutai Timur) menunjukkan peran dan pengaruh kuat lembaga adat dalam pelaksanaan demokrasi di desa. Seperti halnya pemilu, musyarawah, dan lain sebagainya. Pilkades di desa ini memiliki peraturan 'jika bukan masyarakat adat maka tidak boleh mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa'. Peraturan ini adalah peraturan yang sudah sejak dahulu dan diwariskan turun temurun.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak meletakkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa wisata maupun dalam hal substansial musrenbangdes, seperti yang dikemukakan oleh Sutoro Eko. Penguatan partisipasi masyarakat ternyata terlihat pada kelompok-kelompok dan tiap desa ditemukan kelompok-kelompok yang berbeda. Musyawarah yang merupakan bentuk deliberatif seringkali terjadi. Hal ini merupakan penopang demokrasi desa. Namun, demokrasi desa juga telah banyak dipahami sebagai proses pergantian kepemimpinan di desa. Demokrasi di desa berganti makna menjadi elektoralisme di desa. Sehingga, kajian demokrasi desa lebih banyak kajian elektoralisme. Partisipasi masyarakatnya adalah partisipasi elektoral.

Berangkat dari penelitian sebelumnya diatas, maka penelitian ini hendak mencari lebih jauh mengapa partisipasi politik masyarakat itu sangat penting

diwujudkan dalam proses deliberatif. Penelitian ini meletakkan partisipasi pada subjek masyarakat dan bentuk arenanya adalah musyawarah di desa. Peneliti ini akan melihat pula representasi atau peranan kelompok-kelompok masyarakat. Peranan dari masyarakat tersebut dilihat lebih dalam lagi dalam hal aspirasinya. Ditambah juga penguatan demokrasi desa dalam bentuk musyawarah desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Demokrasi Komunitarian

Dari sudut pandang komunitarian, demokrasi adalah cara atau seni ‘menyatukan kehidupan’ untuk mencapai kebaikan bersama. Prinsip dasar demokrasi menurut perspektif masyarakat adalah mendengarkan dan menghormati orang lain. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, maka pemerintah harus mendengarkan suara rakyat dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Sebagai seni kehidupan bermasyarakat, demokrasi dapat diimplementasikan pada tataran proses dan kultural.

Demokrasi prosedural mengacu antara lain pada mekanisme pengambilan keputusan, penunjukan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi tingkat budaya mengacu pada budaya atau kebiasaan hidup bermasyarakat sehari-hari dalam arena masyarakat madani. Ini tercermin dalam budaya yang toleran, terbuka, egaliter, bertanggung jawab, saling percaya, peduli terhadap warga negara, kompetensi politik, dan lain-lain.

Demokrasi komunitarian desa pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi: demokrasi politik (pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dalam rembug desa), demokrasi sosial (solidaritas bersama melalui gotong-royong) dan demokrasi ekonomi (kepemilikan tanah secara komunal) (Eko, 2014). Begitupun dalam desa Indonesia yang asli menurut Mohammad Hatta dalam bukunya 'Demokrasi Kita' yang secara garis besar menerangkan demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi desa.

Dalam desa Indonesia yang asli, segala peraturan yang mengenai kepentingan hidup bersama diputuskan dengan jalan mufakat, yang dilakukan dalam rapat desa. Segala usaha yang berat, yang terpikul oleh tenaga orang menjadi usaha bersama didasarkan pada tolong menolong. Sifat pertama yaitu mengambil keputusan secara mufakat dengan musyawarah yang menjadi dasar demokrasi politik. Sifat kedua yaitu tolong menolong dan gotong royong adalah sendi yang bagus untuk menegakkan demokrasi ekonomi (Hatta, 2014).

Demokrasi desa dalam penelitian ini diletakan dalam kerangka demokrasi komunitarian yang memiliki substansi dalam tiga prinsip. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Sutoro Eko seperti halnya diatas. Prinsip demokrasi politik (pengambilan keputusan melalui musyawarah). Prinsip demokrasi sosial melalui gotong royong. Kemudian Prinsip ekonomi, kepemilikan tanah secara komunal.

2. Partisipasi Masyarakat

Individu secara tidak langsung merupakan bagian dari komunitas ketika berkumpul bersama dan memiliki tujuan bersama serta dengan identitas yang sama. Dalam hal ini, orang menjadi bagian dari masyarakat (*society*) ketika berkumpul bersama maupun bergerak dalam gerakan organisasi sosial. Partisipasi masyarakat terjadi antara lain dalam proses musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di desa, kecamatan, dan kabupaten kota (Eko, 2013).

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan masyarakat (Totok & Poerwoko, 2013). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori partisipasi masyarakat Yadav dalam buku Totok dan Poerwoko yang berjudul 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik'. Terdapat empat kategori yang menentukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terdiri dari:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam program melalui forum yang terdidik, yang mensyaratkan partisipasi anggota masyarakat daerah dalam pengambilan keputusan suatu program yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk pekerjaan, uang dan berbagai bantuan serta pemberian yang bermanfaat bagi anggota masyarakat lain yang

bersangkutan, perwujudan pembangunan ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan setiap masyarakat menyelesaikan program pembangunan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya khusus untuk membimbing masyarakat agar dapat melakukan pemeliharaan terhadap setiap hasil pembangunan, agar selalu terjaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan aspirasi bersama, selain itu kegiatan asesmen ini juga bermanfaat untuk mendapatkan materi tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Yaitu komponen terpenting yang mudah dilupakan, tujuan pelaksanaan pembangunan adalah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat agar tercapai hasil pembangunan yang merata. Berkat pemanfaatan hasil program pembangunan ini menggugah simpati, keinginan dan perhatian masyarakat untuk ikut serta memajukan program pembangunan daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini mengikuti teori partisipasi masyarakat Yadav diatas. Partisipasi masyarakat yang dikategorikan menjadi empat hal. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan

pembangunan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

3. Governance

Pemerintah (*Government*) adalah konsep khusus yang berbeda dengan pemangku kepentingan atau pemimpin orang banyak, dan konsep pemerintah tentu mengalami perubahan pada lintasan panjang sejarah peradaban dunia (Yunanto, 2021). Tata pemerintahan (*governance*) yang dalam hal ini dapat berupa interaksi antara pemerintah dengan negara, dengan masyarakat sipil, dan dengan masyarakat ekonomi (Eko, 2021). Dari dua pernyataan diatas, peneliti dapat pahami yakni adanya pemerintah itu mengikuti perkembangan manusia.

Dalam menjalankan pemerintahan selalu berinteraksi dengan negara dan manusia (baik secara politik, hukum, administrasi, maupun ekonomi). Pemerintahan adalah hal Ikhwal pemerintah, yakni sebagai gagasan, institusi, perbuatan pemerintah, dan fungsi-fungsi pemerintah (Yunanto, 2021). Pemerintah terus memainkan peran penting dalam hal pembuatan kebijakan, pengaturan kekayaan, pembuatan hukum, tata kelola, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya pemerintah yang dibentuk oleh rakyat akan memerintah negara untuk melayani warga.

Menurut UNDP (United Nation Development Program) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam

pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut (Mulyawan, 2009: 20-23); (Nurimansyah et al. 2020); (Resky, M. 2021).

- a. Partisipasi Setiap orang atau warga negara harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan Hukum (*Rule of Law*) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi
Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh orang-orang yang membutuhkannya, serta informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
- d. Daya tanggap (*Responsiveness*) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) Pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

- f. Berkeadilan (*Equity*), Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- g. Efektifitas dan Efisiensi Setiap proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yg benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas Para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sektor pelayanan, dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*). Pertanggung jawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.
- i. Bervisi Strategis
Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultur, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
- j. Saling Keterkaitan
Bahwa keseluruhan ciri *good governance* tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri

Governance hadir bersama dengan pemerintah (*government*). Pemerintah tanpa *governance* atau interaksi dengan pihak luar akan menjadi dunia perkantoran (Yunanto, 2021). Konsep ini menempatkan pemerintah (*government*) Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang sebagai objek kajian. Pusat perhatian pada interaksi pemerintah dengan berbagai aktor dalam ranah hajat hidup orang banyak maupun denyut nadi kehidupan rakyat. Untuk ini, studi ini meletakkan *Governance* sebagai perspektif dalam melihat partisipasi politik masyarakat desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran atau teoritis yang membentuk dan mempengaruhi terhadap permasalahan penelitian yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia (Cresswell, 2015). Yang dimaksud kualitatif dalam penelitian ini adalah datanya. Data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam kata keadaan atau kata sifat (Arikunto, 2020).

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah mengeksplorasi

kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) dengan pengumpulan data yang detail dan melibatkan berbagai sumber informasi. Beragam informasi dapat dilakukan misalnya dengan pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dan berbagai laporan atau dokumen yang melaporkan deskripsi kasus (Cresswell, 2015).

Studi kasus dapat diberedakan menjadi tiga tipe yaitu eksplanatoris, eksploratis, dan deskriptif (Yin, 2012). Pada penelitian ini memilih studi kasus eksplanatoris karena mengacu pada rumusan masalah ‘Mengapa’ dan lebih mengarah pada penggunaan strategi-strategi studi kasus, historis, dan eksperimen.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Mengingat data sementara peneliti berdasarkan observasi lapangan di Desa Baya Mulya menunjukkan partisipasi masyarakat yang cukup rendah. Penelitian ini akan dilakukan selama satu bulan, yakni pada bulan Januari – Februari 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga hal untuk mengumpulkan data. Yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi seringkali disebut pengamatan yang meliputi pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek menggunakan seluruh alat indra. Jadi,

mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung di dalam artian penelitian observasi dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, ataupun rekaman suara (Arikunto, 2020).

- b. Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu (Arikunto, 2020).

Adapun narasumber/ informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. Kemudian daftar pertanyaan terlampir pada lampiran paling akhir.

Tabel 1. 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	Kepala Desa Baya Mulya	Sarjana	35 th
2	Robintara	Sekretaris Desa Baya Mulya	Sarjana	30 th
3	Sugiyanto	Kepala Urusan Perencanaan Desa Baya Mulya	SMA	27 th
4	Hermanus Suri	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baya Mulya	SMA	43 th
5	Toni	Kepala Wilayah/ Dusun	SMA	40 th
6	Ayu	Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya	SMA	28 th
7	Adin	Masyarakat	SMA	62 th
8	Arnansius	Masyarakat	SMA	40 th
9	Logang	Masyarakat	SMA	65 th
10	Yohanes	Masyarakat	SMA	54 th
11	Ratim	Masyarakat	SMA	41 th

- c. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data-data yang pasti tentang penelitian. Data diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini, lebih ringkasnya dapat di lihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1. 2 Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data		Teknik Pengumpulan Data	
Data Primer	Catatan lapangan	Hasil Wawancara: 1. Kepala Desa Baya Mulya 2. Sekretaris Desa Baya Mulya 3. Kepala Urusan Desa Baya Mulya 4. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baya Mulya 5. Kepala Dusun Desa Baya Mulya 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya 7. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya 8. Unsur Masyarakat 9. Undangan (Pihak Ketiga)	Wawancara
		Dokumen, Foto, Audio, Piagam, Sertifikasi, Rapat Desa, kegiatan masyarakat, kegiatan perangkat desa	Observasi
		Profil Desa Baya Mulya Risalah Musyawarah Desa Baya Mulya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Baya Mulya	Dokumentasi

Data Sekunder	Dokumen Tertulis	Rencana Kerja Pemerintah Desa Baya Mulya	Dokumentasi
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMDesa) Desa Baya Mulya	
		Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Jurnal, buku, berita	
	Dokumen Visual	Foto dan audio record	Dokumentasi

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Shidiq dan Choiri, 2019). Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yakni Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data berarti peneliti mulai merangkum dan memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal penting. Sehingga, reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. Peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- c. Setelah melakukan penyajian data, peneliti akan membuat penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang umum bersifat sementara dan dapat berubah yang dibuktikan oleh bukti-bukti. Kesimpulan penelitian harus dapat menjawab rumusan masalah sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

BAB II

PROFIL DESA BAYA MULYA

A. Sejarah Desa Baya Mulya, Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat

Desa Baya Mulya terbentuk pada tahun 2011 dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian, hasil pemekaran dari Desa Baya Betung dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan desa sendiri sejak bulan Juli tahun 2013, dan menjadi Desa devinitif pada tahun 2014 sampai sekarang.

Desa Baya Mulya terdiri dari penggabungan 2 dusun yaitu Dusun Baya dan Dusun Tebodak Kaca. Desa Baya Mulya terletak dibagian timur kecamatan Sungai Tebelian berada di jalur jalan lintas Sintang – Nanga Pinoh (Kabupaten Melawi) sekitar 4 kilo meter dari jalan negara masuk dalam desa Nobal ke desa Baya Mulya, dan merupakan desa pertengahan antara desa Nobal, desa Baya Betung, desa Sabang Surai dan desa Bonet Engkabang.

Sejarah asal usul nama desa Baya Mulya diambil kata ‘Baya’ dan ‘Mulya’. Pada jaman dahulu ada seseorang yang memelihara Buaya di Teluk Baya di Sungai Dakan, maka untuk mengabadikannya di beri nama ‘BAYA’ untuk kata awalan desa. Selanjutnya ‘MULYA’ berasal dari musyawarah kesepakatan - antara tokoh masyarakat dayak, sunda, jawa,

melayu, agar bisa menjadi tali persaudaraan antar suku dan agama maka di ambil kata ‘MULYA’. Oleh karena itu jadilah nama desa “Baya Mulya” dan untuk mengenang hal tersebut maka dengan kesepakatan bersama diambillah nama baya mulya sebagai nama desa, yang terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Baya (dusun Lama) dan Dusun Tebodak Kaca (dusun Pemekaran).

B. Gambaran Wilayah Desa Baya Mulya

1. Batas Wilayah

Desa Baya Mulya mempunyai luas wilayah 5000 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Desa Sabang Surai
- Sebelah barat : Desa Nobal
- Sebelah utara : Desa Bonet Engkabang
- Sebelah timur : Desa Baya Betung

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

- Tanah Sawah : 0 Ha
- Tanah Tegalan/Ladang : 7 Ha
- Pemukiman : 36 Ha
- Pekarangan : 1.8 Ha
- Perkebunan : 540 Ha
- Tanah Kas Desa : 5 Ha

- Lapangan Olahraga : 0,75 Ha
- Perkantoran Pemerintah : 1,75 Ha
- Tempat Pemakaman Umum : 2,50 Ha
- Bangunan Sekolah : 1.7 Ha
- Jalan : 3,50 Ha
- Hutan Rakyat : 100 Ha

3. Iklim

- Curah Hujan : 301 Mm
- Jumlah Bulan Hujan : 6 Bulan
- Kembapan : 75
- Suhu rata-rata harian : 97° C
- Tinggi Tempat Permukaan Laut : 500 Mdpl

4. Orbitasi

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 24 km
 Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor sekitar 1 jam dan Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki sekitar 5 jam.
- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 44 km
 Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor selama 2 jam, sedangkan Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan berjalan kaki selam 10 jam
- Jarak ke Ibukota Provinsi : 434 km

5. Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor selama 24 Jam, sedangkan Lama jarak tempuh ke Ibukota **Kecamatan** dengan berjalan kaki selama 108,5 Jam.

C. Potensi Sumber Daya Alam

1) Pertanian

a. Kepemilikan Lahan Pertanian

- Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 83 KK
Keluarga
- Tidak memiliki : 0 Keluarga
- Memiliki kurang dari 10 Ha : 83 Keluarga
- Jumlah total keluarga petani : 83 Keluarga

b. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

- Padi Tegalan : 0 Ha
- Padi Sawah : 0 Ha

2) Perkebunan

a. Luas hasil perkebunan berdasarkan komoditas

- Kopi : 0
- Lada : 0
- Cengkeh : 0
- Karet : 100 Ha. 5kg/ Ha

3) Kehutanan

Luas hutan lindung 100 Ha

4) Peternakan

- Sapi : 3 ekor
- Ayam Kampung : 275 ekor
- Ayam Boiler : 0 ekor
- Ayam Peterlur : 0 ekor
- Bebek : 23 ekor
- Kambing : 37 ekor

5) Perikanan

- Bawal
- Mujaer
- Nila
- Lele
- Gurame

6) Bahan Galian Produksi

- Pasir : 0 M3
- Batu Kali : 0 M3

D. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Baya Mulya Berdasarkan Profil Desa Tahun 2021 Per 31 Desember 2021 Adalah Sebesar 501 Jiwa Yang Terdiri Dari Laki Laki 155 Jiwa Dan Perempuan 151 Jiwa, sedangkan Pertumbuhan Penduduk Dari Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021 Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Desa Baya Mulya 2019 – 2021

Jenis Kelamin	2019	2020	2021
Laki laki	237	238	235
Perempuan	269	270	266
Jumlah	506	508	501

Sumber : Profil Desa 2021

2. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Baya Mulya bekerja pada sektor pertanian dan penoreh karet secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Baya Mulya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Mata Pencapaian Penduduk Desa Baya Mulya

Mata pencapaian	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	208	-	208	-	209	-
Perdagangan	4	-	4	-	4	-
Jasa	-	-	-	-	-	-
PNS	4	2	4	3	4	3

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

3. Pertumbuhan Angkatan Kerja

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan. Adapun angka pertumbuhan secara detail dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Pertumbuhan Angkatan Kerja Desa Baya Mulya

Klassifikasi	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Usia Kerja	103	99	105	100	107	101
Angkatan Kerja	103	99	105	100	107	101
Mencari Kerja	5	3	5	3	5	3

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

4. Pendidikan

Di Desa Baya Mulya Masih terdapat 20 % perempuan yang belum tamat SD dan 20 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 6 % untuk wanita dan 8 % untuk laki laki.

Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Baya Mulya

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	45	40
Tamat SD	15	20
Tamat SLTP	14	16
Tamat SLTA	10	15
Tamat Akademi/PT	8	6

Berdasarkan tabel diatas, tampak jelas bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Baya Mulya justru hanya lulusan SD dan disusul dengan SLTP.

E. Pemerintahan Desa

1. Kepala dan sekretaris desa dari masa ke masa

Berikut adalah Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari tahun 2013 sampai dengan saat ini :

Tabel 2. 5 Daftar Nama Kepala Desa Baya Mulya

TAHUN	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2013	Lorensius Logang	PJ. KADES
2014 - 2020	Yosef Suratman	KADES
2020 - 2021	Stevanus Santapsius	PJ. KADES
2021 - 2027	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	KADES

Tabel 2. 6 Daftar Nama Sekretaris Desa Baya Mulya

TAHUN	KEBAYAN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2013	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	
2014 - 2015	Alberta Eny Triyanti,S.K.M	
2015 - 2020	Robintara	
2021 - 2027	Robintara	

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Baya Mulya Menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (2 Kaur dan 2 Kasi), selengkapnya sebagai berikut :

Gambar 2. 1 SOTK Pemerintah Desa Baya Mulya



3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Terdapat 7 (tujuh) kelembagaan masyarakat yang terdata pada data desa Baya Mulya. Diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 LKD Baya Mulya

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LP3M			
2	PKK	24	24	0
3	Karang Taruna	9	7	2
4	RW	2	2	0
5	RT	6	5	1
6	Gapoktan	0	0	0
7	Kelompok Tani	8	43	6

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

4. Sarana dan Prasarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat Membantu Keberlangsungan Kehidupan Masyarakat. Di Desa Baya Mulya Sendiri, Potensi Sarana Dan Prasarana Sudah Cukup Baik Dan Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

Beberapa Sarana Dan Prasarana Mulai Dari Kesehatan, Pendidikan, Transportasi Dan Lain-Lain Sudah Dibangun Dan Akan Terus Dilanjutkan Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dan Menunjang Mobilitas Perekonomian Di Desa Baya Mulya.

Berikut Ini Merupakan Beberapa Sarana Dan Prasarana Yang Sudah Ada Di Desa Baya Mulya:

Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Vol
1.	Jalan Usaha Tani	Rusak	10 Km
2.	Jalan Desa	Rusak	5 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,9 Km
4.	Jalan Kabupaten	Rusak	5 Km
5.	Jalan Propinsi	-	- Km
6.	Jembatan Kayu/Bambu	Rusak	2 Bh

Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Vol
1.	Jaringan Internet	Ada	10 Km
2.	Website Desa	Belum ada	5 Km
3.	Wifi	Cukup	2,9 Km
4.	Twiter	Rusak	5 Km
5.	Facebook	-	- Km
6.	Banner Transparansi	Rusak	2 Bh
7.	Papan Informasi		

F. Visi dan Misi Arah Pembangunan Desa

1. Visi

Terwujudnya Desa Baya Mulya yang Maju, Adil, Aman dan Bermartabat.

2. Misi

- 1) Menciptakan Terwujudnya Kerukunan dan Ketentraman antar Umat Beragama dalam kehidupan Bermasyarakat ;

- 2) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat agar terjadi sinergisitas yang optimal dalam mewujudkan Pembangunan Pemerintah Desa yang transparan serta bertanggungjawab ;
- 3) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan prima yang baik untuk masyarakat ;
- 4) Pemerataan Pembangunan Fisik dan Non Fisik agar tidak terjadi kesenjangan sosial ;
- 5) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK dan Karang Taruna.

3. Program kerja berbasis pada skala prioritas masyarakat

- 1) Membantu Menumbuhkan nilai – nilai kebersamaan agar tumbuh rasa saling menghargai, Menghormati, dan tidak ada perbedaan antara satu sama lain ;
- 2) Bekerja sama melibatkan semua masyarakat dalam proses perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan meliputi Pembangunan Peningkatan Jalan Desa dan Lingkungan, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Gedung Kesenian dan Pembangunan di Bidang Olah Raga ;
- 3) Akan Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa ;

- 4) Mewujudkan Transparansi dan Bertanggungjawab dengan Keuangan Desa ;
- 5) Mewujudkan Sinergisitas dengan Masyarakat dan BPD ;
- 6) Mewujudkan Pemerataan di Setiap tahap Pembangunan Fisik dan Non Fisik ;
- 7) Memfungsikan PKK sebagai wadah pembinaan kepada ibu – ibu untuk berkarya ;
- 8) Mewujudkan persatuan olah raga Desa melalui Kepemimpinan Karang Taruna Desa ;
- 9) Membantu Membangun Kembali mental positif dari usia di bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Kesenian Budaya ;
- 10) Mengajak Masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi ;
- 11) Membentuk kelompok Tani, Peternakan, Perikanan dan Memfungsikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Partipasi politik masyarakat desa Baya Mulya dalam pengambilan keputusan masih dalam tahap terlibat aktif mengusulkan aspirasinya. Masyarakat desa selalu hadir dalam setiap pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari berita acara yang terjadi sebuah dialog antara pemerintah desa Baya Mulya dengan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat desa Baya Mulya dalam pelaksanaan pembangunan hanya sebatas menghibahkan tanah untuk desa yang diharapkan untuk diolah dan kembali kepada masyarakat. Hal ini banyak dikatakan oleh masyarakat Baya Mulya meskipun belum ada dokumen pembuktian atas pemberian dari masyarakat terhadap desa Baya Mulya.
3. Partisipasi masyarakat desa Baya Mulya dalam pemantauan dan evaluasi sangatlah kritis dan kecewa terhadap apa yang dilakukan pemerintah desa atas tanah yang dihibahkan untuk desa. Hal ini didasari oleh beberapa statment masyarakat yang menyatakan menurunnya kegiatan masyarakat seperti gotong-royong, karena aspirasi yang disampaikan belum sepenuhnya diolah oleh pemerintah desa Baya Mulya.

4. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangun dinilai belum ada, karena memang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Baya Mulya dianggap belum ada. Hal ini didasari oleh beberapa statment masyarakat dan ungkapan kekecewaan masyarakat desa Baya Mulya atas aspirasinya yang belum diolah, alhasil masyarakat hanya melakukan kesehariannya saja dengan kelompoknya masing-masing.
5. Praktek demokrasi desa yang terjadi adalah formalistik, yang hanya sebagai prosedural belaka. Terdapat Benang merah antara representasi Masyarakat yang terbentuk dalam lembaga. Lembaga kemasyarakatan, kemudian menjadi potensi desa dalam hal sumber daya manusia, ditambah dengan Partisipasi yang dapat dikatakan cukup ‘aktif’ namun ‘tak punya harapan lebih’. Hal yang dikerjakan hanya karena menjalankan peraturan dan bisa jadi isinya adalah sebuah sosialiasi program dari atas untuk diterapkan ke bawah.

B. Saran

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan minimal tidak dipertahankan untuk keaktifannya. Hanya saja perlu dikuatkan untuk mengawal apa yang menjadi kehendak masyarakat melalui kelembagaan yang dimiliki atau terbentuk atas prakarsa masyarakat sendiri. Sehingga akuntabilitas para pengambil keputusan (*decision makers*) dapat mempertanggung jawabkan atas keputusan yang diambil.

2. Masyarakat setidaknya jangan hanya terjebak atas apa yang telah diberikan seperti tanah yang dihibahkan seolah-olah menjadi pemberian yang sangat luar biasa bagi desa. Masyarakat dapat terus bersikap kritis dan terus berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sehingga, terjadi transparansi terutama menanyakan dan mengetahui lalu muncul solusi atas dasar apa dan mengapa tanah yang diagungkan tidak berjalan sesuai keinginan masyarakat.
3. Masyarakat hendaknya tetap bersikap kritis atas kebijakan yang diambil pemerintah desa dengan memperkuat lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Bukan menurunkan partisipasi teknis layaknya gotong-royong. Setidaknya dengan penguatan lembaga-lembaga masyarakat lalu ada daya tangkap antar institusi dan berorientasi pada sebuah konsensus bersama.
4. Masyarakat tidak boleh menilai tidak ada pembangunan hanya karena satu hal saja. Namun, bisa sedikit lebih jernih untuk dapat memanfaatkan apa yang telah diperbuat oleh pemerintah desa Baya Mulya. Sehingga, ada saling keterikatan antara pemerintah desa dengan masyarakat Baya Mulya.
5. Pemerintah desa Baya Mulya wajib menerapkan tradisi demokrasi komunitarian. Yakni, secara politik (pengambilan keputusan dilakukan bersama masyarakat dalam musyawarah desa), secara sosial (sesering mungkin untuk melibatkan segala kegiatan gotong - royong bersama

masyarakat desa), dan secara ekonomi (kepemilikan tanah secara komunal) dalam artian mewujudkan kebermanfaatan tanah yang telah dihibahkan masyarakat untuk desa sesuai kesepakatan bersama masyarakat desa dan dikelola bersama masyarakat desa. Alhasil, interaksi yang dibangun adalah interaksi secara intensif, substantif, kolaboratif, dan solutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminurosyah, J., Jauchar, B., & Alaydrus, A. (2021). Demokrasi Di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur): Demokrasi Di Desa [Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur]. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2), 92-109.
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cressswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara lima Pendekatan* (S. Zuhri Qudsy (ed); 1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dala, I. M., Maemunah, M., & Saddam, S. (2021, September). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubhada Sebagai Desa Wisata. In *Seminar Nasional Paedagoria* (Vol. 1, pp. 112-125).
- Darin, D., Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11-21.
- Eko, S. (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Jogjakarta: Ire.
- Eko, S. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Governabilitas*, 2(1), 1-20.
- Febrianti, S. (2017). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata “Blue Lagoon” Dalem Widodomartani Ngemplak Sleman. *Geo Educasia-S1*, 2 (6), 788- 806.
- Hardiman, Budi F. (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ Dan ‘Ruang Publik’ Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hatta, M. (2014). *Demokrasi Kita*. Bandung: SEGA ARSY.
- Idat, I. T., Hadi, K., & Werefriandus, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDES di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 63-79.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200.

- Renaldi, L., Srumbung, K., Magelang, K., & Strongman, L. (2021). Dibalik Kekalahan Petahana. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2, 81–98.
- Resky, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance* (No. hqxu5). Center for Open Science.
- Rusfiana, Y. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa Sangiang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2021. *Jurnal Sagacious*, 9(1).
- Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *In Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Totok, M., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 3(1), 14-24.
- Yunanto. (2021). Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat. *Governabilitas*, 2(2), 170-196.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Informan	Daftar Pertanyaan
Kepala Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none">1. Menurut anda, apa yang menjadi potensi dari desa Baya Mulya?2. Bagaimana dinamika perjalanan anda selama menjadi kepala desa di Desa Baya Mulya yang dapat dikatakan masih dalam kategori desa baru?3. Adanya undang-undang desa itu memberikan pengakuan dan penghormatan pada desa sekaligus memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Menurut anda, seberapa penting anda memahami aturan atau minimal undang-undang desa sebagai pegangan kepala desa?4. Sejauh mana peran anda sebagai kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Baya Mulya?5. Bagaimana pandangan anda terkait dengan cara kerja perangkat desa yang membantu anda selama ini?6. Bagaimana pandangan anda terhadap kerja sekretaris desa di desa Baya Mulya?7. Bagaimana pandangan anda terhadap kelompok masyarakat yang ada di desa Baya Mulya?8. Bagaimana pandangan anda atau kerjasama anda dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa Baya Mulya?9. Sejauh mana anda mengetahui dan memahami proses musyawarah desa yang pernah dilakukan di Desa Baya Mulya, bisa diceritakan seingat anda?10. Menurut anda, bagaimana partisipasi masyarakat desa Baya Mulya dalam proses perencanaan pembangunan desa atau dalam musyawarah desa yang anda ketahui?11. Sejauh mana program yang ada atau kebijakan atau hal yang anda (desa) perbuat itu berdampak pada kemakmuran masyarakat desa Baya Mulya?12. Kesan apa yang anda paling ingat atau paling berharga selama menjadi kepala desa Baya Mulya?13. Menurut anda, apa yang menjadi kekurangan atau yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari desa Baya Mulya?14. Apakah ada sebuah pesan yang sejatinya anda pendam untuk masyarakat desa Baya Mulya? Jikalau ada, bisa diceritakan?

	15. Warisan apa yang hendak anda berikan untuk pembangunan yang ada di desa Baya Mulya?
--	---

Informan	Daftar Pertanyaan
Sekretaris Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana rasanya menjadi sekretaris desa di desa Baya Mulya yang merupakan desa pemekaran? 2. Potensi semacam apa yang menjadi kekuatan desa Baya Mulya dalam pandangan anda? 3. Seringkali ditemukan kepala desa bekerja tidak hanya dikantor, melainkan 24 jam dan bersama masyarakat desa. Lantas bagaimana dengan sekretaris desa yang anda ketahui secara umum? 4. Bagaimana peranan sekretaris desa selama ini, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? 5. Sebagai pemegang jabatan sekretaris desa, apakah anda sering terlibat dalam kegiatan bersama masyarakat desa? 6. Keterlibatan semacam apa yang pernah anda ikuti dan paling menyetuh hati sekaligus pikiran bersama masyarakat desa? 7. Peran apa yang anda berikan untuk membantu kepala desa Baya Mulya? 8. Bagaimana anda melihat figur atau kepemimpinan kepala desa Baya Mulya? 9. Bagaimana pandangan anda terkait dengan cara kerja perangkat desa yang membantu anda selama ini? 10. Seberapa sering anda terlibat komunikasi aktif dengan badan permusyawaratan desa Baya Mulya? 11. Bagaimana pandangan anda terhadap masyarakat desa Baya Mulya 12. Selama ini, bagaimana anda melihat dinamika yang terjadi dalam unsur masyarakat (lembaga kemasyarakatan desa) yang ada di desa Baya Mulya? 13. Bisa diceritakan dinamika terkait dengan proses musyawarah desa? 14. Menurut anda, apa yang harus menjadi pegangan seorang sekretaris desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa, khususnya di desa Baya Mulya? 15. Menurut anda, apa yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat desa Baya Mulya terkait dengan partisipasi membangun desa?

Informan	Daftar Pertanyaan
Kepala Urusan Perencanaan Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal apa yang menarik dari desa Baya Mulya yang dapat dilihat dari seorang Kaur Perencanaan desa? 2. Bagaimana suka dan duka menjadi Kaur Perencanaan di desa Baya Mulya? 3. Apa yang menjadi tugas dari kepala urusan perencanaan di desa Baya Mulya? 4. Bagaimana dinamika anda dengan kepala desa, perangkat desa lainnya, BPD, ataupun masyarakat desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan desa Baya Mulya? 5. Sejauh mana peranan masyarakat desa Baya Mulya dalam perencanaan pembangunan desa? 6. Sejauh kacamata anda, bagaimana problem di desa Baya Mulya di selesaikan, apakah musyawarah atau cara lain? 7. Musyawarah desa atau yang lainnya di desa Baya Mulya itu proses dan dinamikanya itu bagaimana? 8. Menurut anda, bagaimana dengan keterlibatan masyarakat desa Baya Mulya selama ini. Khususnya dalam membangun desa? 9. Apa yang perlu diperbaiki dari sistem atau yang sudah dijalankan untuk internal pemerintah desa Baya Mulya? 10. Menurut anda, hal semacam apa yang perlu menjadi pegangan masyarakat desa Baya Mulya untuk terlibat aktif dalam membangun desa?

Informan	Daftar Pertanyaan
Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana suka dan duka menjadi Kaur Perencanaan di desa Baya Mulya? 2. Apa yang menjadi tugas dari kepala seksi pemerintahan di desa Baya Mulya? 3. Bagaimana dinamika anda dengan kepala desa, perangkat desa lainnya, BPD, ataupun masyarakat desa dalam bingkai ketugasan anda desa Baya Mulya? 4. Sejauh penilaian mana peranan masyarakat desa Baya Mulya dalam membangun desa ? 5. Sejauh mana mengerti bagaimana hubungan anda dengan badan permusyawatan desa dan masyarakat dalam urusan

	pemerintahan desa?
--	--------------------

Informan	Daftar Pertanyaan
Kepala Dusun/ Wilayah di salah satu dusun Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana rasanya menjadi kepala wilayah/ dusun di desa Baya Mulya yang merupakan desa pemekaran? 2. Potensi semacam apa yang menjadi kekuatan desa Baya Mulya dalam pandangan anda? 3. Seringkali ditemukan kepala desa bekerja tidak hanya dikantor, melainkan 24 jam dan bersama masyarakat desa. Lantas bagaimana dengan anda yang memang harusnya lebih lagi berada di bawah bersama warga desa yang anda rasakan? 4. Bagaimana peranan kepala dusun selama ini, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? 5. Sebagai pemegang jabatan kepala dusun, apakah kegiatan bersama masyarakat desa apa yang paling penting menurut anda? 6. Keterlibatan semacam apa yang pernah anda ikuti dan paling menyetuh hati sekaligus pikiran bersama masyarakat desa? 7. Peran apa yang anda berikan untuk membantu kepala desa Baya Mulya? 8. Bagaimana anda melihat figur atau kepemimpinan kepala desa Baya Mulya? 9. Bagaimana pandangan anda terkait dengan cara kerja perangkat desa lainnya non kepala dusun di Desa Baya Mulya yang selama ini? 10. Seberapa sering anda terlibat komunikasi aktif dengan badan permusyawaratan desa Baya Mulya? 11. Bagaimana pandangan anda terhadap masyarakat desa Baya Mulya khususnya di wilayah anda? Bisa diceritakan? 12. Selama ini, bagaimana anda melihat dinamika yang terjadi dalam unsur masyarakat (lembaga kemasyarakatan desa) yang ada di desa Baya Mulya? 13. Bisa diceritakan dinamika terkait dengan proses musyawarah desa? 14. Menurut anda, apa yang harus menjadi pegangan seorang pemerintah desa (kades + perangkat) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di desa, khususnya di desa Baya Mulya?

	15. Menurut anda, apa yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat desa Baya Mulya terkait dengan partisipasi membangun desa?
--	--

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, hal apa yang menjadi daya tarik atau nilai tawar dari desa Baya Mulya? 2. Dalam kapasitas sebagai ketua BPD, apa yang anda lakukan untuk memajukan desa Baya Mulya? 3. Komunikasi seperti apa yang anda lakukan dengan kepala desa Baya Mulya maupun perangkat desa? 4. Bagaimana pandangan anda terkait dengan masyarakat desa Baya Mulya? 5. Bagaimana anda melihat keterlibatan masyarakat desa dalam rangka membangun desa Baya Mulya? 6. Bagaimana ketugasan anda sebagai BPD untuk berperan aktif turut merencanakan perencanaan pembangunan desa Baya Mulya? 7. Dalam hal musyawarah desa, sejauh yang anda ketahui, bagaimana musyawarah yang terjadi di desa Baya Mulya? 8. BPD memang tidak terlalu di perhatikan pasca terbitnya UU Desa, namun banyak BPD yang berperan mewujudkan kemakmuran di desa. Lantas, bagaimana peranan BPD di desa Baya Mulya untuk memakmurkan warga desa? 9. Menurut anda, apa yang perlu diperbaiki dari desa Baya Mulya? 10. Secara pribadi, pemberian apa yang paling berharga dari diri anda pribadi untuk pembangunan di desa Baya Mulya?
---	--

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, hal apa yang menjadi daya tarik atau nilai tawar dari desa Baya Mulya? 2. Dalam kapasitas sebagai sekretaris, apa yang anda lakukan untuk memajukan desa Baya Mulya? 3. Bagaimana pandangan anda terkait dengan masyarakat desa Baya Mulya? 4. Bagaimana anda melihat keterlibatan masyarakat desa dalam rangka membangun desa Baya Mulya? 5. Bagaimana ketugasan anda sebagai BPD untuk berperan aktif turut merencanakan perencanaan pembangunan desa Baya Mulya? 6. Dalam hal musyawarah desa, sejauh yang anda ketahui, bagaimana musyawarah yang terjadi di desa Baya Mulya?
--	---

	<p>7. BPD memang tidak terlalu di perhatikan pasca terbitnya UU Desa, namun banyak BPD yang berperan mewujudkan kemakmuran di desa. Lantas, bagaimana peranan BPD di desa Baya Mulya untuk memakmurkan warga desa?</p> <p>8. Apa yang perlu diperbaiki dari desa Baya Mulya?</p>
Informan	Daftar Pertanyaan
Unsur Masyarakat Desa Baya Mulya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda, apa yang menjadi potensi dari desa Baya Mulya? 2. Adanya undang-undang desa itu memberikan pengakuan dan penghormatan pada desa sekaligus memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Menurut anda, seberapa penting anda memahami aturan atau minimal undang-undang desa? 3. Masalah apa yang menjadi krusial bagi masyarakat di Desa Baya Mulya? 4. Bagaimana keterlibatan anda dalam proses perencanaan pembangunan desa Baya Mulya? 5. Bagaimana pandangan anda terkait dengan cara kerja pemerintah desa Baya Mulya selama ini? 6. Bagaimana pandangan anda terhadap Badan Permusyawaratan Desa di desa Baya Mulya? 7. Sejauh mana anda mengetahui dan memahami proses musyawarah desa yang pernah di lakukan di Desa Baya Mulya, bisa diceritakan seingat anda? 8. Sejauh mana program yang di buat atau kebijakan atau hal yang desa perbuat itu berdampak pada kemakmuran masyarakat desa Baya Mulya? 9. Sejauh mana akses yang dapat diterima oleh unsur masyarakat atas program desa Baya Mulya? 10. Menurut anda, apa yang menjadi kekurangan atau yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari desa Baya Mulya?

Informan	Daftar Pertanyaan
Undangan (saat musdes), mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 pasal 23 ayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kesan anda terhadap desa, pemerintah desa, BPD, dan unsur lainnya di desa Baya Mulya? 2. Hal seperti apa yang anda berikan untuk desa Baya Mulya? 3. Bagaimana pandangan anda terkait partisipasi masyarakat dalam musyawarah ataupun perencanaan pembangunan desa di Baya Mulya? 4. Sejauh yang anda ketahui, bagaimana akses yang dapat diterima masyarakat atas program desa? 5. Seperti apa pandangan anda terkait dinamika yang terjadi

(3) dan (4). Dengan cacatan kalau ada.	<p>di desa Baya Mulya antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Baya Mulya</p> <p>6. Hal apa yang perlu diperbaiki dari desa Baya Mulya?</p> <p>7. Pelajaran apa yang anda ambil selama di desa Baya Mulya?</p>
--	---

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Ket:
 Dokumentasi bersama Ibu Eni selaku Kepala Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
 Dokumentasi bersama Bapak Roby selaku Sekretaris Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
Dokumentasi bersama Bapak Suri selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
Dokumentasi bersama Bapak Sugianto selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
Dokumentasi bersama Ibu Ayu selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
Dokumentasi bersama Bapak Adin selaku Tokoh Masyarakat Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
Dokumentasi bersama Bapak Arnansius selaku Tokoh Masyarakat Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Ket:
Dokumentasi bersama Bapak Logang selaku Tokoh Masyarakat Desa Baya Mulya. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau